

**LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
(L K P P D)
AKHIR TAHUN ANGGARAN TAHUN 2023**



**PEMERINTAH DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO
KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023**



KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO

Nomor : 141/ /LKPPD/III/2024

Mangunsari, 15 Maret 2024

Lampiran : 1 (satu) bendel

Perihal : Laporan Keterangan

Kepada :

Penyelenggaraan

Yth. Bupati Temanggung

Pemerintahan Desa (LKPPD)

Melalui Camat Ngadirejo

Akhir Tahun 2023

di-

TEMANGGUNG

Dengan hormat,

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa maka bersama ini kami sampaikan kepada Bapak Bupati Temanggung berupa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) Akhir Tahun 2023, sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Desa Mangunsari

DINA HARYANTI

KESEPAKATAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA MANGUNSARI
KECAMATAN NGADIREJO KABUPATEN TEMANGGUNG
TENTANG
LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA MANGUNSARI
TAHUN 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : ROFI'I
ALAMAT : Dsn. Nglarang I RT.05, RW.03 Desa Mangunsari
JABATAN : Ketua BPD Mangunsari

Bertindak untuk dan atas nama BPD Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : DINA HARYANTI
ALAMAT : Dsn. Nglarang I RT.02, RW.03 Ds.Mangunsari
JABATAN : Kepala Desa Mangunsari

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2023 telah melalui pembahasan dan disepakati.
2. Jika terdapat evaluasi maka akan segera diadakan penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK PERTAMA

Mangunsari, Maret 2024
PIHAK KEDUA

ROFI'I

DINA HARYANTI

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas segala taufik dan hidayah-Nya perkenankanlah kami menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) Tahun 2023 Desa Mangunsari, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung.

Sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa mengacu Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun kebijakan program kerja tahun 2023 secara garis besar meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Masyarakat Desa dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dalam kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada BPD, LPMD, RT/RW, Tokoh Masyarakat dan segenap Masyarakat Desa Mangunsari yang telah banyak membantu dan memberi dukungan dan partisipasi dalam pembangunan sehingga dapat terlaksana program kerja ini, guna penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD).

Demikian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LKPPD) ini dibuat dan atas kekurangannya kami mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Mangunsari, 14 Maret 2023

Kepala Desa Mangunsari

DINA HARYANTI

DAFTAR ISI

Surat Pengantar	i
Kesepakatan Bersama BPD dan Kepala Desa	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I. Tujuan Penyusunan Laporan	1
A. Latar Belakang	1
B. Gambaran Umum Desa	1
C. Maksud dan Tujuan	4
D. Dasar Hukum	4
II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	5
A. Visi	5
B. Misi	6
III. Strategi dan Kebijakan	6
A. Strategi	6
B. Arah Kebijakan	7
BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA	8
A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa..	8
B. Rencana dan Pelaksanan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa...	9
C. Rencana dan Pelaksanaa Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	11
D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat	12
E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	12
BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA	13
A. Peraturan Desa tentang APBDes	13
B. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes	19
BAB IV KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH	26
BAB V PENUTUP	29
LAMPIRAN –LAMPIRAN	
A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	30
B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	47
C. Format Rincian Kegiatan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	60
D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023	67
E. Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan	67

BAB I

PENDAHULUAN

I. Tujuan Penyusunan Laporan

A. Latar Belakang

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki otonomi yaitu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat yang diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara Kesatuan RI, dalam penyelenggaraan pemerintahan desanya dituntut untuk semakin maju. Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan terwujudnya otonomi desa adalah keberhasilan pembangunan desa. Oleh karenanya dalam pembangunan desa dibutuhkan perencanaan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan.

Sebagaimana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa disusun perencanaan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah yang meliputi Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa selama kurun waktu 1 (satu) tahun, disusun secara partisipatif dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan dalam pembangunan desa guna penyerapan aspirasi masyarakat dan menciptakan rasa memiliki serta tanggungjawab bersama dalam pelaksanaan pembangunan desanya, transparan, serta selektif dengan mengutamakan skala prioritas desa dan berpihak pada kebutuhan masyarakat dalam rangka menangani permasalahan yang dihadapi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan desa.

Dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan kemajuan Desa Mangunsari beberapa kegiatan pembangunan fisik maupun non fisik yang akan telah dilaksanakan antara lain adalah pembangunan

infrastruktur pedesaan, pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan, sarana dan prasarana pertanian, sarana dan prasarana pendidikan.

Dari kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan tersebut untuk menuju pada kemajuan Desa Mangunsari dalam menghadapi tantangan otonomi desa sehingga Desa Mangunsari menjadi desa yang maju dan mandiri maka perlu adanya komitmen bersama para pemangku kepentingan pembangunan desa yang ditetapkan dalam Visi dan Misi Desa. Secara garis besar tantangan desa menuju desa yang maju dan mandiri adalah optimalisasi PAD desa.

Peningkatan SDM, optimalisasi pemberdayaan masyarakat desa/lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan Sarpras infrastruktur.

B. Gambaran Umum Desa

Gambaran umum Desa Mangunsari Kecamatan Ngadirejo Kabupaten Temanggung yang dapat kami laporkan adalah sebagai berikut :

➤ Kondisi Geografis

a. Letak

Desa Mangunsari terletak pada ketinggian 800 mdpl s/d 1.000 mdpl. Desa Mangunsari berjarak 2 kilometer dari Kecamatan Ngadirejo dan 20 kilometer dari ibukota Kabupaten Temanggung, dengan batas Desa sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Desa Muntung dan desa Bantir
- Sebelah Timur : Desa Morobongo dan desa Mento
- Sebelah Selatan : Desa Gondangwinangun dan desa Ngaren
- Sebelah Barat : Desa Campursari

b. Geografis

Luas wilayah Desa Mangunsari adalah 160,045 hektar, terdiri dari :

- Persawahan : 139,045 ha
- Pemukiman : 14,225 ha
- Tegalan : - ha
- Lain-lain : 6,7 ha

Secara administrasi Desa Mangunsari terbagi menjadi 4 (empat) Dusun yang terbagi menjadi 4 (empat) Rukun Warga (RW) dan 31 (tiga puluh satu) Rukun Tangga (RT) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1.

PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF

NO	NAMA DUSUN	NAMA RW	JUMLAH RT
1	Dusun Sobahan	RW 01	8 RT
2	Dusun Bondalem	RW 02	7 RT
3	Dusun Nglarang I	RW 03	7 RT
4	Dusun Nglarang II	RW 04	9 RT
	JUMLAH	4 RW	31 W

➤ Gambaran Umum Demografis

Jumlah penduduk Desa Mangunsari pada akhir bulan Desember tahun 2023 sebanyak 2.702 jiwa , yang terdiri dari:

Tabel 2.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT WILAYAH DUSUN DAN JENIS KELAMIN

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sobahan	295	293	588
2.	Bondalem	311	325	645
3.	Nglarang I	252	264	516
4.	Nglarang II	482	480	962
	JUMLAH	1340	1362	2702

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan lebih banyak daripada jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dengan prosentasi 49,5 % untuk penduduk laki-laki dan 50,4 % untuk penduduk perempuan. Sedangkan Jumlah Kepala Keluarga sebanyak 850 Kepala Keluarga.

Tabel 3.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT WILAYAH DUSUN DAN JENIS KELAMIN

No	Umur (Tahun)	Jumlah
1	00 – 04	153
2	05 – 09	188
3	10 – 14	227
4	15 – 19	211
5	20 – 24	171
6	25 – 29	227
7	30 – 34	187
8	35 - 39	180
9	40 – 44	166
10	45 – 49	171
11	50 – 54	207
12	55 – 59	167
13	60 – 64	151
14	65 – 69	131
15	70 – 74	75
16	75 +	90
	Jumlah	2.702

Perkembangan pendidikan di Desa Mangunsari dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Jumlah Sekolah, Jumlah siswa baik untuk pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan serta beberapa indikator tingkat partisipasinya.

Data tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Tidak/Belum Sekolah/Balita	559
2	Belum tamat SD/Sederajat	356
3	Tamat SD/ sederajat	916
4	Tamat SMP/ Sederajat	471
5	Tamat SMA/ Sederajat	325
6	Diploma D1/D2	6
7	Diploma III/ Sarjana Muda	24
8	Diploma IV/ S1	45
9	S2	0
10	S3	0
	Jumlah	2.702

Berdasarkan tabel tersebut maka dapat dilihat bahwa status Pendidikan penduduk desa Mangunsari masih banyak yang baru tamat SD.

Penduduk Desa Mangunsari sebagian besar bermata pencaharian sebagai Petani, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.

KOMPOSISI PENDUDUK BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
Belum/Tidak Bekerja	547
Mengurus Rumah	159
Pelajar/ Mahasiswa	487
Pensiunan	8

PNS	14
TNI	1
Kepolisian RI	2
Perdagangan	17
Petani	700
Transportasi	20
Karyawan Swasta	195
Karyawan BUMD	1
Karyawan Honorer	2
Buruh Harian Lepas	49
Buruh Tani/pekebun	43
Tukang Cukur	1
Tukang Batu	5
Tukang Kayu	7
Tukang Las	3
Tukang Jahit	7
Penata Rias	1
Mekanik	6
Guru	22
Bidan	2
Pelaut	4
Sopir	8
Pedagang	197
Perangkat Desa	11
Kepala Desa	1
Wiraswasta	182
JUMLAH PENDUDUK	2.702

Berdasarkan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa mata pencaharian penduduk Desa Mangunsari, petani lebih banyak daripada mata pencaharian lainnya.

➤ **Kondisi Keadaan Sosial**

Kondisi sosial masyarakat Desa Mangunsari ditunjukkan masih rendahnya kualitas dari sebagian besar SDM masyarakat serta cenderung masih kuatnya budaya paternalistik. Meskipun demikian pola budaya seperti ini dapat dikembangkan sebagai kekuatan dalam pembangunan yang bersifat mobilitas masa . Disamping itu masyarakat Desa Mangunsari yang cenderung memiliki sifat ekspresif, agamis dan terbuka dapat dimanfaatkan sebagai

pendorong budaya transparansi dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Munculnya masalah kemiskinan, ketenagakerjaan dan perburuhan menyangkut pendapatan, status pemanfaatan lahan pada fasilitas umum menunjukkan masih adanya kelemahan pemahaman masyarakat terhadap hukum yang ada saat ini. Hal tersebut sebagai akibat dari tidak meratanya tingkat pendidikan yang diperoleh masyarakat.

Adapun jumlah sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7.

JUMLAH SARANA PENDIDIKAN

NO	Sarana pendidikan	JUMLAH
1	Gedung PAUD	1
2	Gedung TK	1
3	Gedung SD	2
Jumlah		4

Dari daftar diatas menunjukkan bahwa peran masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan umum di Desa Mangunsari cukup berkembang utamanya pada penyelenggaraan pendidikan umum ditingkat Taman kanak-kanak / PAUD.

Penduduk Desa Mangunsari memeluk agama Islam, budha, Katholik, Kristen. Jumlah penduduk agama di Desa Mangunsari sebagai berikut :

Tabel 8.

JUMLAH PENDUDUK MENURUT PEMELUK AGAMA

NO	Agama	JUMLAH
1	Islam	2.637
2	Kristen	3

3	Katholik	64
Jumlah		2.702

Dari jumlah pemeluk agama tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa Mangunsari beragama Islam (97,59 %), kristen (0,01 %), Katolik (2,36 %). Sarana peribadatan yang diinventarisasi meliputi Masjid, Mushola dan Gereja. Pada Tahun 2023 jumlah sarana peribadatan berupa Masjid sebanyak 4 buah, Mushola 7 buah. Selain sarana peribadatan tersebut juga terdapat sarana prasarana keagamaan lainnya yaitu TPQ 4 buah.

Sarana/Prasarana dan Tenaga kesehatan meliputi PKD, Posyandu, Kader Kesehatan, Bidan Desa sebagaimana tabel berikut ;

Tabel 9.

JUMLAH SARANA/PRASARANA DAN TENAGA KESEHATAN

NO	Sarana/Prasarana dan Tenaga Kesehatan	JUMLAH
1	Gedung PKD	1
2	Posyandu	1
3	Kader Kesehatan	30
4	Bidan Desa	1
Jumlah		34

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana/ prasarana Posyandu belum terdapat pada masing-masing dusun.

Potensi budaya Desa Mangunsari cukup banyak dan merupakan peninggalan leluhur dengan nilai-nilai tradisi yang perlu terus dipertahankan.

Tabel 10.

JENIS TRADISI / UPACARA ADAT

No	JENIS UPACARA	JUMLAH	LOKASI
1	Suran	4	4 Dusun
2	Sadranan	4	4 Dusun
3	Bersih Desa	4	4 Dusun
4	Haul	4	4 Dusun
5	Wiwit	3	3 Dusun
6	Maulud Nabi	4	4 Dusun
7	Tingkeban/Mitoni	4	4 Dusun
8	Perayaan 17 an	1	1 Dusun
	Jumlah	28	

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa budaya dan nilai tradisi di Desa Mangunsari berjalan turun temurun.

Sedangkan dalam bidang kesenian Desa Mangunsari masih kurang berkembang dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 11.

JENIS KESENIAN

No	Jenis Kesenian	Jumlah
1	Kuda Lumping	4
2	Rebana	3
3	Topeng ireng	1
	Jumlah	7

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa Desa Mangunsari memiliki banyak keanekaragaman kesenian yang perlu terus dikembangkan.

Dalam bidang kepemudaan dan olahraga, Desa Mangunsari memiliki sarana dan prasana, yang dapat di lihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 12.

SARANA DAN PRASARANA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH
1	Lapangan sepak bola mini	4
2	Meja tenis	1
3	Lapangan badminton	1
4	Lapangan volley	1
	Jumlah	7

Berdasarkan tabel diatas, sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di Desa Mangunsari belum cukup memadai, hal ini juga menunjukkan perlunya dukungan lebih kepada organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Desa Mangunsari

Tabel 13.

NAMA ORGANISASI

NO	NAMA ORGANISASI	KETUA	JUMLAH ANGGOTA
1	Karang Taruna KHARISMA	Aditya Bayu Purnomo	160 Orang
2	PESSO (Persatuan Sepak Bola Sobahan)	Edi	30 Orang
3	PUMMA (Sepak Bola Bondalem)	Adi Setyo Budi	30 Orang
4	AKUMA (Sepak Bola Nglarang I)	Priyo	30 Orang
5	PERSEMA (Sepak Bola	Paksi Anggrafinas	30 Orang

	Nglarang II)		
6	IPPKL (Ikatan Pemuda Pemudi Karang Lor)	Adit Purnomo	60 Orang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa ada organisasi kepemudaan dan olahraga di Desa Mangunsari.

➤ **Kondisi Ekonomi**

Perekonomian Desa Mangunsari secara umum didominasi pada sektor pertanian yang sistem pengelolaannya masih menggunakan cara tradisional baik pengolahan lahan, pola tanam maupun pemilihan komoditas produk pertaniannya. Produk pertanian Desa Mangunsari yang sebagian wilayahnya berupa lahan sawah masih monoton pada unggulan sayuran seperti cabai, tomat, kubis serta padi, jagung dan tembakau, hal ini diakibatkan adanya struktur tanah yang mungkin belum tepat untuk produk unggulan pertanian lainnya dan persoalan yang paling mendasar adalah sumber pengairan yang kurang pada musim kemarau sehingga berdampak adanya kekurangan air pada musim tersebut. Oleh karenanya harus ada langkah strategis dalam mengatasi persoalan pertanian dengan melakukan berbagai upaya, diantaranya adalah perbaikan system irigasi/pengairan, penggunaan teknologi tepat guna, perbaikan pola tanam dan pemilihan komoditas alternative dengan mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak yang terkait baik dengan dinas pengairan maupun dinas pertanian. Sebagai langkah alternative yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui penyuluhan-penyuluhan dan pertemuan kelompok tani.

Luas lahan pertanian yang ada di Desa Mangunsari adalah 105,00 Ha, dengan rincian penggunaan adalah :

Tabel 14.

PENGUNAAN LAHAN PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	JENIS PENGGUNAAN	LUAS (Ha)
1	Tanah Sawah	138,45 ha
	<i>a. Sawah Irigasi ½ teknis</i>	<i>32 ha</i>
	<i>b. Sawah Irigasi teknis</i>	<i>69 ha</i>

	<i>c. Sawah irigasi sederhana</i>	37,45 ha
JUMLAH		138,45 ha

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan pertanian di Desa Mangunsari belum sepenuhnya menggunakan irigasi teknis.

Adapun komoditas baik pertanian maupun perkebunan yang ada di Desa Mangunsari dapat dilihat pada 3 dusun berikut:

Tabel 15.

JENIS KOMODITAS

NO	JENIS KOMODITAS	HASIL
1	Tembakau	(per tahun)
2	Cabai	Sepanjang tahun
3	Jagung	Sepanjang tahun
4	Kopi	Per tahun
5	Kubis	Sepanjang tahun
6	Padi	Sepanjang tahun
7	Ketela Pohon	Sepanjang tahun
8	Ketela rambat	Per tahun
9	Terong	Sepanjang tahun
10	Tomat	Sepanjang tahun
11	Sawi	Sepanjang Tahun
12	Alpukat	Per tahun
13	Jeruk lemon California	Per tahun

Berdasarkan diatas, menunjukkan bahwa komoditas pertanian merupakan komoditas utama di Desa Mangunsari.

Sedangkan potensi peternakan dalam mengembangkan ekonomi kerakyatan dalam bidang peternakan dan perikanan dirinci sebagai berikut :

Tabel 16.

POTENSI BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN

NO	JENIS HEWAN	JUMLAH
1	Sapi	110 ekor
2	Domba	1104 ekor
3	Ayam	1060 ekor
4	Itik	600 ekor
5	Angsa	12 ekor
6	Marmut	200 ekor
7	Burung	170 ekor

Berdasarkan table diatas, menunjukkan bahwa komoditas peternakan di Desa Mangunsari masih terbatas pada jenis ternak sapi, domba ,ayam, itik, angsa, marmot, burung, itupun belum dikelola secara optimal. Hal ini disebabkan karena peternakan masih merupakan mata pencaharian tambahan bagi petani di Desa Mangunsari Sedangkan dalam bidang industry terdapat beberapa industry rumah tangga yang berkembang di Desa Mangunsari yang dapat dilihat pada 4 dusun sebagai berikut:

Tabel 17.

JENIS INDUSTRI

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH
1	Keripik	1
2	Tahu	2
3	Antari	1
4	Tempe	1
5	Kerajinan anyaman bambu	1
6	Kerupuk kulit (cecek)	5

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak jenis industry rumah tangga yang ada di Desa Mangunsari yang sangat mendukung perekonomian desa.

Tabel 18.

FASILITAS UMUM BIDANG PEREKONOMIAN

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	Pedagang Pengumpul	17 orang
2	Ojek	4 buah
3	Traktor	6 buah
4	Warung Sembako	27 buah
5	Cultivator	2 unit
6	Kendaraan roda tiga	5 unit

Sedangkan pertumbuhan lembaga yang bergerak dibidang perekonomian masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

Tabel 19.

LEMBAGA EKONOMI DESA

NO	NAMA LED	JUMLAH KELOMPOK
1.	UED-SP	1 kelompok
2.	UP2K	1 Kelompok
3.	SPP	4 kelompok
	Jumlah	6 Kelompok

Sedangkan perkembangan lembaga ekonomi desa masih sangat lamban bahkan beberapa diantaranya terancam macet.

➤ Kondisi Ekonomi

1. Pemerintahan Desa

a. Pemerintah Desa

Organisasi Pemerintah Desa Mangunsari ditetapkan dengan Peraturan Desa Nomor 03 Tahun 2021, terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Desa, 1 (satu) orang Sekretaris Desa, 3 (tiga) orang Kepala Seksi, 3 (tiga) orang Kepala urusan, 4 (empat) orang Kepala Dusun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Aparatur Pemerintah Desa dalam Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tabel berikut:

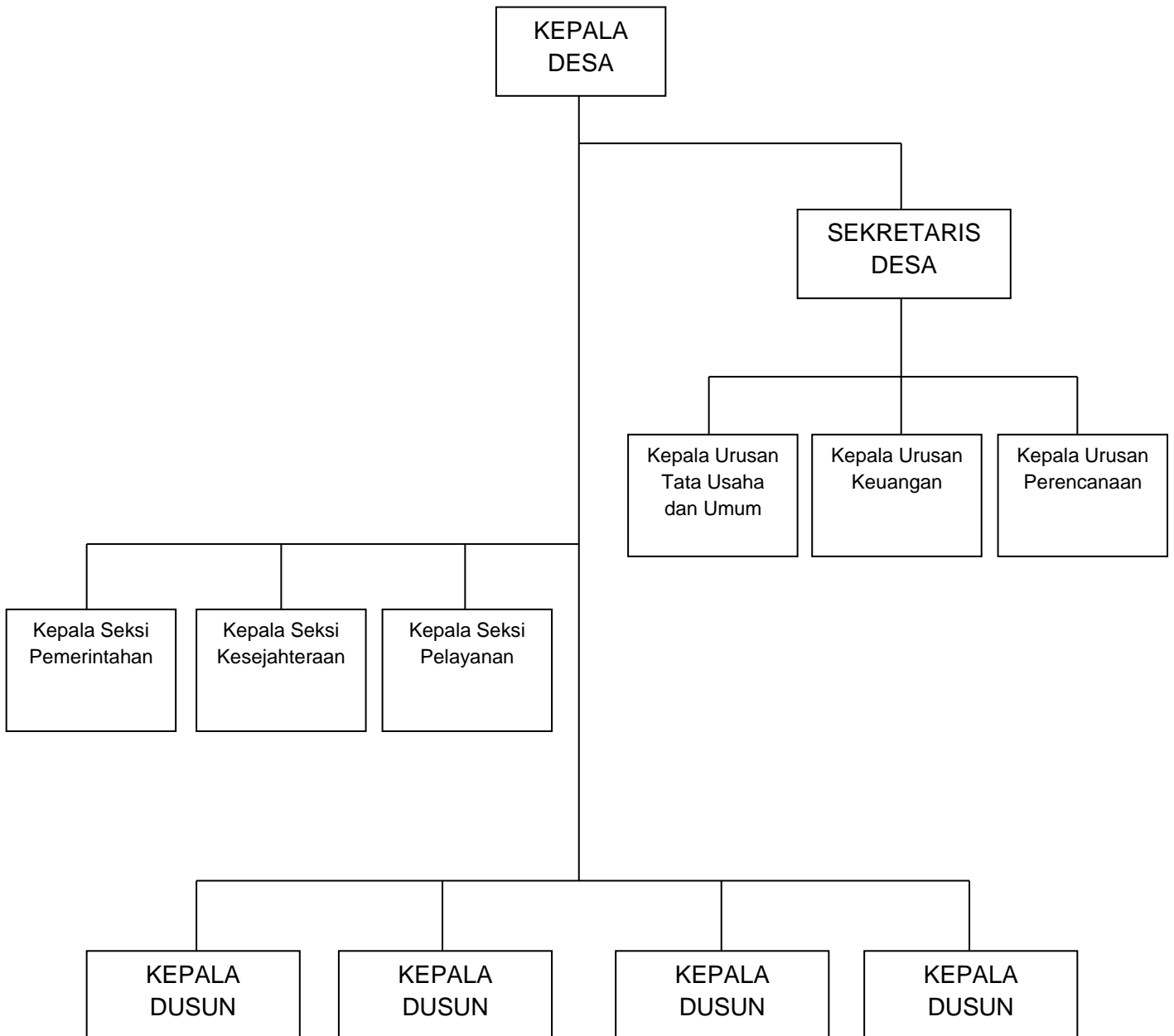
Tabel 20.

APARATUR PEMERINTAH DESA MANGUNSARI

No	Nama	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Pendidikan Dan Agama	Jabatan
1	Dina Haryanti	22/12/1968	Perempuan	SLTA/Islam	Kepala Desa
2	Ma'arif syaifudin, S.H.I	04/04/1991	Laki-laki	S I / Islam	Sekretaris Desa
3	Supriyadi	30/09/1985	Laki-laki	SLTA/Islam	Kasi Pemerintahan
4	Istachori	07/04/1972	Laki-laki	SLTA/Islam	Kasi Kesra
5	Farid Choirudin	11/11/1992	Laki-laki	SLTA/Islam	Kasi Pelayanan
6	Susanti	26/08/1986	Perempuan	SLTA/Islam	Kaur Keuangan
7	Johan Irawan	23/02/1980	Laki-laki	SLTA/Islam	Kaur Perencanaan
8	Sri Lastiyanto	02/12/1986	Laki-laki	SLTA/Islam	Kaur Umum
9	Maryono	06/06/1979	Laki-laki	SLTA/Islam	Kadus Sobahan
10	Sutanto	09/06/1976	Laki-laki	SLTA/Islam	Kadus Bondalem
11	Budi Tamtomo	30/09/1992	Laki-laki	SLTA/Islam	Kadus Nglarang I
12	Rusdiyono	15/11/1972	Laki-laki	SLTA/Islam	Kadus Nglarang II

BAGAN 1.

ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA MANGUNSARI



b. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Mangunsari berjumlah 7 orang yang keanggotaan sebagai berikut:

Tabel 21.

DAFTAR ANGGOTA BPD DESA MANGUNSARI PERIODE 2020-2025

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat
1	Rofi'i	Laki-laki	Ketua	Nglarang I
2	Sofyan	Laki-laki	Wakil ketua	Sobahan
3	G Sri Ningsih	Perempuan	Sekretaris	Nglarang II
4	Eva Pristiwan	Laki-laki	Kabid Pembangunan	Nglarang II
5	Agung Santoso	Laki-laki	Kabid Pemerintahan	Sobahan
6	Pariyono	Laki-laki	Kabid kesra	Bondalem
7	Sumiyati	Perempuan	Anggota	Bondalem

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban:

- 1) Merumuskan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Meminta pertanggungjawaban Kepala Desa atas penyelenggaraan pemerintahan Desa;

2. Keuangan Desa

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Keuangan Desa Mangunsari setiap tahun tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) yang meliputi pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

I. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil Usaha Desa
- Hasil Aset Desa
- Swadaya Partisipasi dan Gotong Royong Masyarakat
- Lain-lain Pendapatan Asli Desa

b. Transfer

- Dana Desa
- Bagian dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah
- Alokasi Dana Desa (ADD)
- Bantuan Keuangan APBD Propinsi
- Bantuan Keuangan APBD Kabupaten

c. Pendapatan Lain-lain

- Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat
- Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah

II. Belanja Desa

Belanja desa digunakan untuk:

- a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- b. Bidang Pembangunan Desa
- c. Bidang Pembinaan Masyarakat Desa
- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Kondisi APB-Desa 5 tahun terakhir Desa Mangunsari secara garis besar terlihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel 22.

PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MANGUNSARI TAHUN 2017 – 2023

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2019	2.135.387.767	1.904.272.243
2	2020	2.193.095.400	2.146.185.269
3	2021	2.137.245.769	1.830.087.850

4	2022	2.077.969.874	1.864.171.696
5	2023	2.205.088.921	2.077.467.141

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan Desa Mangunsari mengalami Fluktuatif tiap tahunnya. Dan pada anggaran tahun 2023 ini mengalami penurunan dikarenakan berkurangnya dana desa. Sedangkan saldo masih ada dikarenakan bantuan propinsi yang belum semuanya terserap.

Tabel 23.

PENDAPATAN ASLI DESA

No	Tahun	Jumlah Pendapatan Asli Desa
1	2019	336.100.000
2	2020	318.350.000
3	2021	347.975.000
4	2022	378.000.000
5	2023	346.175.000

Tabel diatas menunjukkan bahwa pendapatan asli desa mengalami mengalami kenaikan ditahun 2023, akan tetapi tidak signifikan.

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik Pemerintah Desa beserta warga masyarakat secara bertahap melakukan peningkatan sarana dan prasarana.

Tabel 24.

SARANA DAN PRASARANA

NO	NAMA FASILITAS	JUMLAH
1	Kantor Desa	1 buah
2	Balai Desa	I buah

3	Almari kantor / arsip	9 buah
4	Meja dan kursi kantor	12 stel
5	Meja kursi tamu	2 stel
6	Kursi rapat	130 buah
7	Kantor PKK	-
8	Komputer	3 unit
9	Mesin ketik	1 unit
10	Camera Digital	1 unit
11	Telepon	1 unit
12	Laptop	9 unit
13	Sound system	4 unit
14	Printer	5 unit
15	Sepeda Motor	2 unit
16	Mobil siaga	1 unit
17	TV	1 unit
18	Proyektor	1 unit

3. Lembaga Kemasyarakatan Desa:

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa, bahwa Lembaga Kemasyarakatan Desa antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Rukun Warga (RW), Rukun Tetangga (RT), Karang Taruna, dan Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa merupakan mitra kerja Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan Desa Mangunsari sudah terbentuk tetapi belum ditetapkan dengan Peraturan Desa. Lembaga Kemasyarakatan Desa Mangunsari yaitu LPMD, PKK, 31 RT, 4 RW,

Karang Taruna, dan Satgas Linmas, dengan rincian keanggotaan sebagaimana tabel dibawah ini:

DAFTAR PENGURUS LPMD PERIODE MASA BHAKTI TAHUN
2024

NO	NAMA	JABATAN	KET.
1	Saryanto	Ketua	Ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Mangunsari Nomor 07 Tahun 2023
2	Sigit Suwantara	Sekretaris	
3	Sutirto	Bendahara	
4	Kuswanto	Seksi Pembangunan	
5	Sumiyati	Seksi Kesehatan	
6	Hamdan Rusdi	Seksi Agama	
7	Aditya Bayu Purnomo	Seksi Pemuda	
8	Qomari Abdullah	Seksi Keamanan	
9	Kusrini	Anggota	
10	Annisa Sari	Anggota	

Tugas LPMD adalah:

- a. Menyusun rencana pembangunan Desa/Kelurahan secara partisipatif;
- b. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- c. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Tabel 26.

DAFTAR PENGURUS PKK PERIODE MASA BHAKTI TAHUN 2023

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan	Alamat	Ke t.
1	Ely Darojati	Perempuan	Ketua 1	Bondalem	
2	Dina Haryanti	Perempuan	Ketua 2	Nglarang I	
3	Mufty Ma'rifa	Perempuan	Sekretaris	Nglarang II	
4	Lilik Widiasih	Perempuan	Wakil Sekretaris	Bondalem	

5	Kusrini, SE	Perempuan	Bendahara	Sobahan	
6	Susanti	Perempuan	Wakil Bendahara	Sobahan	
7	Sri Rejeki	Perempuan	Ketua Pokja 1	Nglarang II	
8	Sri Rahayu	Perempuan	Sekretaris Pokja 1	Nglarang I	
9	Nofi Kristiana	Perempuan	Bendahara Pokja 1	Bondalem	
10	Siti Mulifah	Perempuan	Anggota Pokja 1	Nglarang II	
11	Annisa Sari	Perempuan	Ketua Pokja 2	Sobahan	
12	Puji Hartati	Perempuan	Sekretaris Pokja 2	Bondalem	
13	Nur Hidayah	Perempuan	Bendahara Pokja 2	Nglarang I	
14	Kusrini	Perempuan	Anggota Pokja 2	Nglarang II	
15	Genduk Sri Ningsih	Perempuan	Ketua Pokja 3	Nglarang II	
16	Yuni Kristiani	Perempuan	Sekretaris Pokja 3	Nglarang I	
17	Nur Aeni	Perempuan	Bendahara Pokja 3	Nglarang II	
18	Istiatun	Perempuan	Anggota Pokja 3	Nglarang II	
19	Yuli Rohani	Perempuan	Anggota Pokja 3	Bondalem	
20	Sumiyati, Am.keb	Perempuan	Ketua Pokja 4	Bondalem	
21	Tarminingsih	Perempuan	Sekretaris Pokja 4	Bondalem	
22	Widayanti	Perempuan	Bendahara Pokja 4	Nglarang I	
23	Muntofiah	Perempuan	Anggota Pokja 4	Nglarang II	
24	Yani Hartanti	Perempuan	Anggota Pokja 4	Sobahan	
25	Siti Robiyatun	Perempuan	Anggota Pokja 4	Nglarang I	
26	Timik Budi Kristiana	Perempuan	Anggota Pokja 4	Nglarang I	

Tugas TP PKK Desa/Kelurahan meliputi:

- a. Membina dan memberdayakan masyarakat menuju keluarga sejahtera;
- b. Melaksanakan 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- c. Membina dan menggerakkan kelompok PKK RW, RT, dan Dasa Wisma;
- d. Menggali, menggerakkan, dan mengembangkan potensi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan program pemerintah yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa.

Tabel 27.

DAFTAR PENGURUS RW DAN RT

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	Slamet Raharjo	Ketua RT-01/RW-01	Sobahan
2	Nartim	Ketua RT-02/RW-01	Sobahan
3	Slamet Sohidin	Ketua RT-03/RW-01	Sobahan
4	Slamet Mustofa	Ketua RT-04/RW-01	Sobahan
5	Jarwadi	Ketua RT-05/RW-01	Sobahan
6	Sarofi	Ketua RT-06/RW-01	Sobahan
7	Hasan As'ari	Ketua RT-07/RW-01	Sobahan
8	Ratman	Ketua RT-08/RW-01	Sobahan
9	Sigit Setyawan	Ketua RT-01/RW-02	Bondalem
10	Budiman	Ketua RT-02/RW-02	Bondalem
11	Kusnadi	Ketua RT-03/RW-02	Bondalem
12	Rusdiyono	Ketua RT-04/RW-02	Bondalem
13	Sukadar	Ketua RT-05/RW-02	Bondalem
14	Sarno	Ketua RT-06/RW-02	Bondalem
15	Abadi	Ketua RT-07/RW-02	Bondalem
16	Ngatijo	Ketua RT-01/RW-03	Nglarang I
17	Sobariyanto	Ketua RT-02/RW-03	Nglarang I
18	Riyono	Ketua RT-03/RW-03	Nglarang I
19	Joko Sulistyio	Ketua RT-04/RW-03	Nglarang I
20	Nafsidah	Ketua RT-05/RW-03	Nglarang I
21	Irwanto	Ketua RT-06/RW-03	Nglarang I
22	Ramiyanto	Ketua RT-07/RW-03	Nglarang I
23	Sarijan	Ketua RT-01/RW-04	Nglarang II
24	Kuswahyutono	Ketua RT-02/RW-04	Nglarang II
25	Surahman	Ketua RT-03/RW-04	Nglarang II
26	Wardiyoso	Ketua RT-04/RW-04	Nglarang II

27	Sarwoto	Ketua RT-05/RW-04	Nglarang II
28	Zaenudin	Ketua RT-06/RW-04	Nglarang II
29	Wakidi	Ketua RT-07/RW-04	Nglarang II
30	Sunardi	Ketua RT-08/RW-04	Nglarang II
31	Paino	Ketua RT-09/RW-04	Nglarang II
32	Sukamto	Ketua RW-01	Sobahan
33	Sishadi	Ketua RW-02	Bondalem
34	Sarjudi	Ketua RW-03	Nglarang I
35	Sudiwanto	Ketua RW-04	Nglarang II

Tugas RT dan RW adalah:

- (1) Membantu terwujudnya kehidupan masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- (2) Membantu penyelenggaraan tugas pemerintah Desa/Kelurahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
- (3) Menggerakkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
- (4) Membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam kebersihan dan penataan lingkungan;
- (5) Membantu terciptanya ketentraman dan ketertiban umum;
- (6) Menjembatani hubungan antar sesama anggota masyarakat dan antar anggota masyarakat dengan pemerintah Desa/Kelurahan;
- (7) Menumbuhkembangkan kehidupan gotong-royong dan sosial kemasyarakatan; dan
- (8) Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Tabel 28.

DAFTAR PENGURUS KARANG TARUNA

No	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	Aditya Bayu Purnomo	Ketua I	Nglarang II	
2	Aan Prastiawan	Ketua II	Nglarang I	
3	Pariyono	Sekretaris I	Bondalem	
4	Oktaviani Dyah Warohmah	Sekretaris II	Nglarang II	
5	Edi	Bendahara	Sobahan	
6	Fahrul	Seksi-seksi	Sobahan	
7	Adi Setyobudi	Seksi-seksi	Bondalem	
8	Gufron Afandi	Seksi-seksi	Bondalem	
9	Fajar Fitriyono	Seksi-seksi	Nglarang II	

Tugas Karang Taruna adalah bersama-sama dengan Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

Tabel 29.

DAFTAR PENGURUS SATGAS LINMAS

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	KET.
1	Qomari	Ketua	Nglarang II	
2	Turahno	Wakil Ketua	Nglarang II	
3	Zaenudin	Anggota	Nglarang II	
4	Siswadi	Anggota	Sobahan	
5	Slamet Sohidin	Anggota	Sobahan	
6	Jumino	Anggota	Sobahan	
7	Bagus Dedi Cahyono	Anggota	Sobahan	
8	Supriyanto	Anggota	Bondalem	

9	Ngadiyono	Anggota	Bondalem
10	Muhaimin	Anggota	Bondalem
11	Darmuji	Anggota	Nglarang I
12	Nafsidah	Anggota	Nglarang I
13	Gunardi	Anggota	Nglarang I
14	Paino	Anggota	Nglarang II
15	M. Tohir	Anggota	Nglarang II
16	Nanang Sulistyio	Anggota	Nglarang II
17	Istadi	Anggota	Nglarang II
18	Rochmad	Anggota	Sobahan

Satgaslinmas mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, membantu aparatur pemerintah dalam memelihara keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan serta membantu pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan pemilihan kepada desa.

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Kerja Pemerintah Desa disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 1 (satu) tahun yaitu tahun 2023.

2. Tujuan

Adapun tujuan adalah merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek : Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa

menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintah desa.

Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

2.1 Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan

2.2 Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, kebersihan, dan sebagainya) erkait pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Perturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Desa ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2023;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
 18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2022 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;

II. Visi dan Misi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

A. Visi

Visi merupakan kesepakatan bersama yang disusun oleh para pemangku kepentingan pembangunan demi terwujudnya Pemerintahan Desa Mangunsari yang baik untuk kurun waktu 6 (Enam) tahun. VISI DESA MANGUNSARI yaitu MANGUNSARI YANG AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN, AGAMIS, SEJAHTERA dengan PEMERINTAHAN YANG BERSIH. Visi tersebut mengandung makna yaitu:

a. AGRARIS BERWAWASAN LINGKUNGAN

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yaitu suatu kondisi dimana sector pertanian yang menjadi mayoritas sebagai mata pencaharian penduduk Desa Mangunsari bisa terfasilitasi baik sebelum maupun pasca produksi tanpa meninggalkan efek buruk bagi lingkungan. Sehingga tercapai suatu kesejahteraan terhadap sebagian besar penduduk desa Mangunsari yang bermata pencaharian sebagai petani, yang secara tidak langsung juga akan berimbas pada kemajuan ekonomi desa.

b. AGAMIS

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu suatu kondisi dimana selain terpenuhinya kebutuhan jasmani masyarakat desa Mangunsari namun juga terpenuhi kebutuhan rohani yang ditandai dengan sikap dan akhlak mulia sesuai dengan pemahaman penghayatan pengamalan ajaran agama didukung dengan kebebasan menjalankan ajaran agama serta toleransi antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Sehingga diharapkan seluruh proses pembangunan yang dilaksanakan di desa Mangunsari selalau tidak meninggalkan norma norma agama.

c. SEJAHTERA

Merupakan sebuah kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yaitu suatu kondisi masyarakat dimana seluruh individu masyarakat Desa Mangunsari dapat mencukupi kebutuhan lahiriyah dan batiniah yang ditandai dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat karena terpenuhinya kebutuhan ekonomi sosial dan religius sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan di bidang ekonomi, sosial, budaya politik dan pertahanan keamanan (esosbudhankam).

d. PEMERINTAHAN YANG BERSIH

Merupakan suatu kondisi yang ingin diwujudkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yaitu suatu kondisi pelaksanaan Pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) sesuai dengan arah pelaksanaan reformasi birokrasi sehingga terwujud pemerintahan yang bersih disemua aspek pelaksanaan pemerintah.

B. Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Berdasarkan Visi tersebut diatas, maka misi pemerintah desa Mangunsari untuk periode 2020-2026 adalah :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian tanpa meniggalkan efek buruk bagi lingkungan.

2. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa melalui pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, kerukunan ummat beragama dan fasilitasi kerukunan umat beragama.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan ketrampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi dalam rangka pengembangan kualitas sumber daya manusia.
4. Mewujudkan peningkatan budaya sehat dan aksesibilitas kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan kemajuan dan kemandirian masyarakat untuk mendukung pemberdayaan masyarakat dalam menanggulangi kemiskinan.
6. Mewujudkan peningkatan infrastruktur desa Mangunsari.
7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih transparan tidak KKN dan berorientasi pada pelayanan public.

III. Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

Berdasarkan masalah mendasar, visi dan misi desa Mangunsari kecamatan nNgadirejo kabupaten Temanggung maka dirumuskan program dan kebijakan yang akan dilaksanakan pada periode 2020 – 2026. Adapun strategi desa Mangunsari sebagai berikut :

1. Meningkatkan fasilitas bidang pertanian baik dengan cara pemberian bantuan alat mesin pertanian maupun sarana produksi lainnya serta pengadaan penyuluhan pertanian organik dan modern guna peningkatan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, yang secara tidak langsung akan berpengaruh pada nilai jual hasil pertanian.
2. Meningkatkan fasilitas kehidupan keagamaan dan optimalisasi peran tokoh-tokoh agama dalam mewujudkan kehidupan agamis dan menembangkan kehidupan agamis dan mengembangkan kehidupan toleransi kerukunan beragama.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki baik sumber daya manusia, sosial, budaya, ekonomi maupun sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan dan optimalisasi peran, serta partisipasi masyarakat.

5. Mengoptimalkan peran lembaga ekonomi desa dalam peningkatan perekonomian desa.
6. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan masyarakat.

B. Arah Kebijakan

Berdasarkan strategi pembangunan desa tersebut diatas, dirumuskan kebijakan umum yang dimaksudkan untuk melaksanakan misi-misi desa. Adapun kebijakan desa Mangunsari adalah :

1. Meningkatkan kualitas iman dan taqwa umat beragama
2. Meningkatkan sarana dan prasarana tempat peribadatan
3. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama
4. Meningkatkan kualitas pendidikan
5. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat
6. Meningkatkan infrastruktur perdesaan
7. Meningkatkan keberdayaan masyarakat
8. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian, peternakan dan perikanan
9. Meningkatkan kualitas lembaga ekonomi desa
10. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa melalui pengembangan home industri / UMKM
11. Meningkatkan kelestarian seni dan budaya desa
12. Meningkatkan peran lembaga desa melalui peningkatan kapasitas pengurus
13. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa
14. Meningkatkan kualitas pelayanan umum terhadap masyarakat
15. Meningkatkan sarana dan prasarana pemerintah desa

BAB II

LAPORAN PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DESA

A. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Desa

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/manfaat	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Pengasilan tetap dan tunjangan kepala desa	Desa	1 Org Kades /	Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja Kades	46.320.000	ADD	V		
		2	Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa	Desa	11 Org	Meningkatkan kesejahteraan dan kinerja perangkat desa	323.076.000	ADD	V		
		3	Tunjangan Ketenagakerjaan	Desa	1 org. Kades dan 11 perangkat desa	Meningkatkan kinerja Kades dan Perangkat desa	1.935.550	ADD			
		4	Penyediaan Operasional pemerintah desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD	Desa	1 Org Sekdes /8 Bln. 3 Org Kaur , 3 Org Kasi	Meningkatkan kinerja Perangkat desa	83.192.839	ADD,PAD,BH P,BHR, SILPA AD, SILPA PAD	V		
		5	Tunjangan	Desa	7 Org /12 Bln	Meningkatkan	23.400.000	PBH	V		

			BPD			kesejahteraan BPD					
		6	Operasional RT/RW	Desa	35 Org / 12 Bln	Meningkatkan kesejahteraan RT/ RW	42.000.000	PBK	V		
		7	Operasional Pemdes yang bersumber dari Dana Desa				13.282.000	DDS	V		
		8	Penyediaan penghasilan lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa			Meningkatkan kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa	225.625.000	PAD	V		
		9	Penyediaan sarana dan prasarana Pemerintan Desa			Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat	142.400.850	PAD, PBP	V		
		10	Pengelolaan administrasi kependudukan	Desa		Penyediaan data valid kependudukan, dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dibidang kependudukan	34.481.650	DDS, PAD	V		
		11	Penyusunan dokumen Perencanaan desa	Desa		Penganggaran yang terstruktur dan maksimal guna mewujudkan visi misi	40.600.000	DDS	V		
		12	Sertifikasi tanah kas desa			Pengamanan aset desa	28.012.000	PAD	V		

		13	Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)			Pemenuhan kewajiban pembayaran pajak PBB	916.752	DLL	V			
	JUMLAH							1.005.242.641				

B. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembangunan Desa

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/manfaat	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ	Desa		Meningkatkan SDM dan sebagai wujud dukungan dibidang pendidikan	16.200.000	DDS	V		
		2 Pembangunan / pemeliharaan TK milik desa	Desa		Meningkatkan SDM dan sebagai wujud dukungan dibidang pendidikan	10.000.000	DDS	V		
		3 Penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat	Desa		Meningkatkan SDM dan sebagai wujud dukungan dibidang pendidikan	32.830.000	DDS	V		

		4	Penyelenggara n Posyandu	Desa		Meningkatkan kehatan masyarakat	35.000.000	DDS	V		
		5	Penyelenggara an desa siaga kehatan			Meningkatkan elayanan kehatan terhadap masyarakat	231.040.000	DDS	V		
		6	Pengasuhan Bersama atau bina keluarga balita	Desa		Meningkatkan elayanan kehatan terhadap masyarakat	3.990.000	DDS	V		
		7	Pembinaan GSIB			Meningkatkan elayanan kehatan terhadap masyarakat	36.517.500	DDS	V		
		8	Pemeliharaan jalan desa	Desa		Perbaikan fasilitas desa untuk meningkatkan kenyamanan Masyarakat desa	31.294.500	DDS, PAD	V		
		9	Pembangunan /rehabilitasi/p eningkatan/pe ngerasan jalan desa			Perbaikan fasilitas desa untuk meningkatkan kenyamanan Masyarakat desa	135.247.500	DDS	V		
		10	Pembangunan /rehabilitasi/p eningkatan balai desa/balai kemasyarakatan			Perbaikan fasilitas desa untuk meningkatkan kenyamanan Masyarakat desa	49.781.000	PBK	V		

			an								
		11	Pembangunan / rehabilitasi / peningkatan senderan/ talud/ irigasi			Perbaikan fasilitas desa untuk meningkatkan kenyamanan Masyarakat desa terutama bidang pertanian	86.066.000	DDS	V		
		12	Pembangunan / pemeliharaan sarana prasarana penerangan jalan			Perbaikan fasilitas desa untuk meningkatkan kenyamanan Masyarakat desa	26.262.500	DDS	V		
		13	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan /rehab rumah tidak layak huni			Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa terutama Masyarakat tidak mampu	49.712.500	DDS	V		
		14	Pembangunan /rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban umum/MCK umum, dll			Meningkatkan Kesehatan masyarakat	7.474.500	DDS	V		
	JUMLAH							751.416.500			

C. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/manfaat	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban oleh pemdes	Desa		Meningkatkan keamanan	4.500.000	PAD	V		
		2	Pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan	Desa		Meningkatkan kualitas kebudayaan	3.000.000	DDS	V		
		3	Pengadaan perlengkapan kesenian	Desa		Pelestarian seni dan budaya	50.000.000	PBK, PBP	V		
		4	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan Tingkat desa	Desa		Meningkatkan SDM	2.250.000	DDS	V		
		5	Pembinaan KPMD	Desa		Meningkatkan kinerja KPMD	5.000.000	PBP	V		
	JUMLAH						64.750.000				

D. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/manfaat	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3	
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan	Desa		Meningkatkan ekonomi Masyarakat terutama perempuan	2.900.000	DDS	V		
		2	Pengadaan sarana promosi produk unggulan desa (expo desa)	Desa		Meningkatkan ekonomi masyarakat	7.000.000	DDS	V		
		3	Pembangunan /rehab pasar desa/kios milik desa	Desa		Meningkatkan ekonomi masyarakat	138.158.000	DDS	V		
	JUMLAH						148.058.000				

E. Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

No	Bidang/Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/manfaat	Biaya & Sumber		Pola Pelaksanaan		
	Bidang	Jenis Kegiatan				Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ke-3
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12
	Penanggulangan Bencana , Darurat	1 Penanganan keadaan mendesak	Desa		Upaya perlindungan terhadap masyarakat	108.000.000	DDS	V		
	JUMLAH					108.000.000				

Mangunsari, 14 Maret 2023
Kepala Desa Mangunsari

DINA HARYANTI

BAB III
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

- Peraturan Desa tentang APBDes dan
- Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban APBDes

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan Laporan

Bahwa telah disusunnya Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Mangunsari ini disamping menjelaskan berbagai program kerja yang telah dilaksanakan maupun yang belum beserta kendala-kendalanya, juga dapat memberikan penjelasan tentang pelaksanaan APBDes yang merupakan gambaran tingkat perkembangan kemajuan desa dibidang pembangunan, serta penilaian terhadap peran serta dan partisipasi masyarakat dalam bidang pembangunan.

B. Penyampaian ucapan terima kasih

Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD) dalam pelaksanaan Program Kerja Kepala Desa Mangunsari Tahun 2023 yang dapat kami sampaikan. Dan kami sadar bahwa pelaksanaan tugas tahun 2023 masih banyak kekurangan, sehingga perlu mendapat penyempurnaan pada masa-masa mendatang,serta kami ucapkan banyak terima kasih atas tersusunannya Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa (LKPPD).

C. Saran dan permohonan petunjuk serta arahan lebih lanjut.

Pengawasan mutlak harus terus dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin kerja agar tercapai daya guna dan hasil guna yang maksimal sebagai wujud Aparatur Pemerintah Desa yang Profesional.

Mangunsari, 14 Maret 2023

Kepala Desa Mangunsari

DINA HARYANTI

A. Format Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp.	1.811.079.798
2. Belanja Desa	Rp.	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	1.005.242.641
b. Bidang Pembangunan	Rp	751.416.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	64.750.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	148.058.000
e. Bidang Tak Terduga	<u>Rp</u>	<u>108.000.000</u>
Jumlah Belanja	Rp	2.007.467.141
Surplus/ Defisit	<u>Rp</u>	<u>266.387.343</u>
3. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	394.009.123
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp</u>	<u>0 -</u>
Pembiayaan Netto (a-b)	<u>Rp</u>	<u>394.009.123</u>

Sisa Lebih Pembiayaan (surplus/defisit+pembiayaan netto) Rp. 127.621.780,-

B. Format Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN -LAMPIRAN

C. Format Rincian Kegiatan Laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ADA/TIDAK ADA YA/TIDAK
1	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan	a. Peraturan Desa	Ada
		b. Peraturan Bersama Kepala Desa	Tidak ada
		c. Peraturan Kepala Desa	Ada
		d. Keputusan Kepala Desa	Ada
2.	Kependudukan	a. Jumlah Penduduk	
		1). Laki-laki	1340
		2). Perempuan	1362
		3). Jumlah Kepala Keluarga	850
		4). Jumlah Anggota Keluarga	1852
		5). Jumlah Jiwa	2702
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan :	
		1). Pendidikan Umum	2702
		2). Pendidikan Khusus	-
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian :	
		Belum/Tidak bekerja	547
		Mengurus rumah tangga	159
Pelajar/Mahasiswa	487		

	Pensiunan / PNS/TNI/Guru/Dosen	47
	Petani/Pekebun/Peternak	743
	Perdagangan	214
	Karyawan Swasta/Wiraswasta	377
	Transportasi	20
	Buruh Harian Lepas /kebun /Ternak	49
	Lainya	59
3. Pertanian	a. Status Tanah :	
	1). Sertifikat Hak Milik	Ada
	2). Sertifikat Hak Guna Usaha	Tidak Ada
	3). Sertifikat Hak Pakai	Tidak Ada
	b. Luas Tanah :	
	1). Bersertifikat	
	2). Belum Bersertifikat	
	3). Tanah Kas Desa	
	c. Peruntukan :	
	1). Jalan	
	2). Tanah Ladang	
	3). Bangunan Umum	
	4). Perumahan	
	5). Ruang Fasilitas Umum	
d. Tanah yang Belum Dikelola		
1). Hutan	Tidak Ada	
2). Rawa-rawa	Tidak ada	

4.	Manajemen Pemerintahan	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1). PNS	
		2). Non PNS	12
		b. Jumlah Anggota BPD	7
		c. Musyawarah Desa	Ada
		d. Musrengbangdes	Ada
5.	Ketentraman dan Ketertiban	a. Pembinaan Hansip	
		1). Jumlah Anggota	18
		2). Alat Pemadam Kebakaran	Tidak ada
		3). Jumlah Hansip Terlatih	18
		b. Ketentraman dan Ketertiban :	
		1). Jumlah Kejadian Kriminal	Tidak ada
		2). Jumlah Bencana Alam	Tidak ada
		3). Jumlah Operasi Penertiban	Tidak ada
		4). Jumlah Pos Keamanan	1
		5). Jumlah Kecelakaan Remaja	2
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan :	
		1). Rt/Rw - Ada/Tidak	Ada
		2). PKK - Ada/Tidak	Ada
		3). Karang Taruna - Ada/Tidak	Ada
		4). Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	Ada
		5). LPM - Ada/Tidak	Ada
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan	Ya

		sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	
		d. Lembaga kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	Ya
		e. Lembaga Adat - Ada Tidak	Tidak ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak
Bidang Pelaksanaan Pembangunan			
No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ADA/TIDAK ADA YA/TIDAK
1	2	3	4
1.	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	Ada
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	Ada
		c. Jalan Provinsi (Km)	Ada
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak Ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
2.	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	1
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	2
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-

		b. Tempat Pendidikan Khusus	
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-kursus (Jumlah)	-
3.	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah Sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
4.	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga :	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	4
		2). Lapangan Khusus (Jumlah)	1
		b. Sarana Kesenian/Kebudayaan :	
		1). Gelanggang Remaja (Jumlah)	-
		2). Gedung Kesenian (Jumlah)	-
		3). Gedung Teater (Jumlah)	-
		4). Gedung Bioskop (Jumlah)	-
		c. Sarana Sosial :	
1). Panti Asuhan (Jumlah)	-		

		2). Panti Pijat Tunanetra (Jumlah)	-
		3). Panti Wardo (Jumlah)	-
		4). Panti Jompo (Jumlah)	-
		d. Sarana Komunikasi :	
		1). Radio Komunitas (Jumlah)	2
		2). Papan Pengumuman (Jumlah)	4
5	Pembangunan Lingk. Hidup	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengmbangan (Jumlah)	
		b. Industri Besar (Jumlah)	-
		c. Industri Sedang (Jumlah)	-
		e. Industri Kecil (Jumlah)	4
		f. Hotel (Jumlah)	-
		g. Restoran/Rumah makan (Jumlah)	2
		h. Saluran Irigasi(Jumlah)	
Bidang Kemasyarakatan			
No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ADA/TIDAK ADA YA/TIDAK
1	2	3	4
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa	
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa kali)	1
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang	1
		Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa kali)	
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa kali)	1

		b. Sosialisasi Kbijakan Pemerintah Daerah	
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa kali)	1
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	-
		c. Sosialisasi kebijakan Pemerintah Desa	
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	2
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa kali)	3
		3) Sosialisasi Peraturan bersama Kepala Desa (Berapa kali)	
2	Pelaksanaan Hak dan kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan kewajiban masyarakat (Berapa kali)	2
		b. Masyarakat mnyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa(ada/Tidak)	Ada
		c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
		d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
		e. Masyarakat berpartisipasi dalam brbagai kegiatan di desa (Ya/Tidak)	Ya
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa kali)	4
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	4
		c. Sosialisasi Mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	5
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa kali)	2
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal(Berapa Kali)	6
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan(Berapa kali)	
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	4
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-

		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja masjid (Jumlah)	4
		d. Remaja Gereja (Jumlah)	1
		e. Remaja Budha (Jumlah)	-
		f. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar Negeri (Jumlah)	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat			
No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ADA/TIDAK ADA YA/TIDAK
1	2	3	4
1	Sosiassi dan Motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa kali)	4
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	4
		c. Bidang Politik (Berapa kali)	-
		d. Bidang Lingkungan Hidup (Berapa kali)	4
2	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa kali)	3
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa kali)	3
		c. Pembrdayaan Olah Raga (Berapa kali)	3
		d. Pemberdayaaan Karang Taruna (Berapa kali)	3
3	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pndidikan (Berapa Kali)	3
		b. Bidang Kesehatan (Berapa kali)	3
Bidang Kemasyarakatan			

No	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah ADA/TIDAK ADA YA/TIDAK		
1	2	3	4		
1	Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa			
		1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa kali)	-		
		2) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa kali)	--		
		3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa kali)			
		b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah			
		1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa kali)			
		2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)			
		c. Sosialisasi kebijakan Pemerintah Desa			
		1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)			
		2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa (Berapa kali)			
		3) Sosialisasi Peraturan bersama Kepala Desa (Berapa kali)			
		2	Pelaksanaan Hak Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan kewajiban masyarakat (Berapa kali)	
				b. Masyarakat mnyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa(ada/Tidak)	Ada
c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya				
d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya				
e. Masyarakat berpartisipasi dalam brbagai kegiatan di desa					

		(Ya/Tidak)	
3	Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa kali)	
		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	
		c. Sosialisasi Mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa Kali)	
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Berapa kali)	
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal(Berapa Kali)	
		f. Sosialisasi mengenai ketenagakerjaan(Berapa kali)	
4	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	4
		b. Majelis Gereja (Jumlah)	1
		c. Majelis Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
		e. Remaja masjid (Jumlah)	4
		d. Remaja Gereja (Jumlah)	1
5	Ketenagakerjaan	e. Remaja Budha (Jumlah)	Tidak Ada
		f. Remaja Hindu (Jumlah)	Tidak Ada
		a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	Tidak Ada
		b. Penampung Pekerja ke luar Negeri (Jumlah)	Tidak Ada

Mangunsari, 14 Maret 2023

Kepala Desa Mangunsari

Sekretaris Desa

DINA HARYANTI

MA'ARIF SYAIFUDIN, S.H.I

D. Laporan Jumlah Penduduk Bulan Desember Tahun 2023

No	Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sobahan	295	293	588
2.	Bondalem	311	325	645
3.	Nglarang I	252	264	516
4.	Nglarang II	482	480	962
	JUMLAH	1340	1362	2702

E. Lampiran Daftar Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa

NO	NOMOR PERDES/ PERKADES/SK	TENTANG	TANGGAL	KET
1	1 TAHUN 2023	Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2023	11/01/2023	Perdes
2	2 TAHUN 2023	Pertanggungjawaban APBDes Tahun 2022	10/01/2023	Perdes
3	3 TAHUN 2023	Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023	13/09/2023	Perdes
4	4 TAHUN 2023	Perubahan Kedua APBDes Tahun 2023	17/10/2023	Perdes
5	5 TAHUN 2023	Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024	28/11/2023	Perdes
6	6 TAHUN 2023	Penyertaan modal Bumdes	06/12/2023	Perdes
7	7 TAHUN 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 202	29/12/2023	Perdes
8	1 TAHUN 2023	BLT-DD Tahun 2023	10/01/2023	Perkades

9	2 TAHUN 2023	Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2023	13/01/2023	Perkades
10	3 TAHUN 2023	Perubahan Penjabaran Perubahan APBDes Tahun 2023	01/09/2023	Perkades
11	4 TAHUN 2023	Penjabaran Perubahan Kedua APBDes Tahun 2023	11/11/2023	Perkades
12	5 TAHUN 2023	BLT-DD Tahun 2023	05/12/2023	Perkades
13	6 TAHUN 2023	Penjabaran APBDes Tahun 2023	30/12/2023	Perkades
14	148/01/I/2023	Penunjukan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD)	04/01/2023	SK
15	148/02/I/2023	Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD)	04/01/2023	SK
16	141/03/I/2023	Penunjukan Bendahara Desa	04/01/2023	SK
17	412.6/04/I/2023	Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)	04/01/2023	SK
18	412.6/05/I/2023	Petugas Guru TK dan TPQ	04/01/2023	SK

19	414.3/06/I/2023	Petugas Profil Desa	04/01/2023	SK
20	149/6.A/I/2023	Penunjukan Ketua RT/RW	04/01/2023	SK
21	411.2/07/I/2023	Tim Penanganan Kemiskinan	04/01/2023	SK
22	411.31/10/I/2023	Penunjukan KPMD	15/01/2023	SK
23	10.A/KPM/I/2023	Penunjukan KPM	15/01/2023	SK
24	411.01/10.B/I/2023	Penunjukan Pengurus PKK	15/01/2023	SK
25	445.7/11/I/2023	Penunjukan Petugas Posyandu Balita	15/01/2023	SK
26	445.7/12/I/2023	Penunjukan Petugas Posyandu Lansia	15/01/2023	SK
27	445.7/13/I/2023	Penunjukan Petugas Posbindu	15/01/2023	SK

28	445.7/14/IV/2023	Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS)	18/04/2023	SK
29	340.11/14.A/I/2023	Penunjukan Pengurus LINMAS	18/04/2023	SK
30	414.3/15/IV/2023	Operator Sistem Informasi Desa	19/04/2023	SK
31	414.31/16/IV/2023	Penunjukan Pejabat Pengurus Barang	20/04/2023	SK
32	17/RKP/VII/2023	Pembentukan Tim Penyusun RKPDes	26/07/2023	SK
33	18 TAHUN 2023	Pembentukan Tim Verifikasi RKPDes	26/07/2023	SK
34	19/RPJMDes/IX/2023	Pembentukan Tim RPJMDes	05/09/2023	SK
35	412.6/21/XII/2023	Pengelola Air Bersih	19/12/2023	SK

E.

F.

BAB IV

KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN UPAYA YANG DITEMPUH

Alhamdulillah, pelaksanaan program kerja pada tahun 2023 telah terlaksanakan dengan lancar. Hanya saja masih sedikit kegiatan yang belum bisa dilaksanakan hingga akhir tahun, terutama bantuan dana dari propinsi. Hal tersebut dikarenakan dana yang akan dialokasikan turun mendekati akhir tahun, sehingga untuk pelaksanaannya tidak memungkinkan untuk dilaksanakan di akhir tahun tersebut karena tentu saja disamping waktu pengerjaannya tidak mencukupi, tetapi juga pengadministrasiannya juga tidak mencukupi. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala untuk mewujudkan atau menjalankan program kerja maupun kegiatan yang sudah direncanakan, karena kegiatan maupun program tersebut direncanakan dilanjutkan pada awal tahun 2023.

Kedepan diharapkan hal tersebut tidak terjadi lagi sehingga semua program kegiatan yang direncanakan bisa terlaksana semua pada waktu yang tepat. Tentunya hal tersebut perlu didukung oleh berbagai elemen, terutama Pelaksana Kegiatan, TPK, maupun hal-hal lain yang berkompeten guna lancarnya pelaksanaan program kegiatan yang direncanakan. Hal lain yang terkadang diluar kuasa kita adalah terkait cuaca pada saat pelaksanaan program pembangunan, yang terkadang bisa menjadikan waktu penyelesaian pekerjaan agak molor. Maka perlu penjadwalan yang sesuai, kapan suatu kegiatan harus dilaksanakan, agar kendala-kendala yang dihadapi bisa sedikit dieliminir.

Peningkatan fasilitas sarana maupun prasarana serta Sumber Daya Manusia Pelaksana Kegiatan juga dipandang penting. Karena dengan sumber daya manusia dan fasilitas yang mumpuni tentunya akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang sudah direncanakan.